

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sektor pertanian memiliki peranan penting dalam mendukung perekonomian nasional. Peran tersebut terutama dalam terciptanya ketahanan pangan, penyumbang produk domestik bruto, penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan, penyediaan bahan pangan dan bahan baku industri, sumber pendapatan masyarakat, serta penciptaan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan sektor lainnya (Kementan, 2013).

Penyuluhan pertanian di Indonesia berada dalam kondisi keterbatasan dan kekurangan penyuluh. Kinerja penyuluh pertanian yang baik merupakan dambaan kita semua demi suksesnya pembangunan pertanian di Indonesia. Keadaan petani saat ini yang masih banyak terbelenggu oleh kemiskinan merupakan ciri bahwa penyuluhan pertanian masih perlu untuk terus meningkatkan peranannya dalam rangka membantu petani memecahkan masalah mereka sendiri, terutama dalam aspek usahatani mereka secara menyeluruh (Abdullah dkk, 2023).

Penyuluhan pertanian di Indonesia telah mempunyai sejarah yang cukup panjang, yang dimulai sejak awal abad 20 di masa penjajahan. Penyuluhan bermula dari adanya kebutuhan untuk meningkatkan hasil pertanian, baik untuk kepentingan penjajah maupun mencukupi kebutuhan pribumi (Faisal, 2020).

Penyuluh pertanian merupakan pendidikan non formal bagi petani beserta keluarganya dimana kegiatan dalam ahli pengetahuan dan keterampilan dari penyuluh lapangan kepada petani dan keluarganya berlangsung melalui proses belajar mengajar. Seorang penyuluh mempengaruhi sasaran melalui perannya

sebagai motivator, fasilitator, komunikator, serta innovator petani (Marbun et al, 2019).

Penyuluh pertanian bisa menjadi sarana kebijaksanaan yang efektif untuk mendorong pembangunan pertanian dalam situasi petani tidak mampu mencapai tujuannya karena keterbatasan pengetahuan dan wawasan. Penyuluh memiliki peranan penting sebagai ujung tombak serta jembatan antara pemerintah dan petani sebagai pelaku utama sehingga dituntut memiliki pengetahuan, informasi yang memadai untuk petani dan kemampuan untuk akses dan tanggap terhadap perkembangan teknologi (Wijaya et al.,2019).

Penyuluhan pertanian masih dipersepsikan sebagai alat pemerintah untuk pencapaian target produksi secara nasional dengan pendekatan yang bersifat top-down dan sentralistik. Kritikan terhadap pendekatan ini telah banyak dilakukan oleh berbagai kalangan. Para petani dinilai tidak mendapatkan cukup insentif dan termotivasi melaksanakan pencapaian target produksi yang direncanakan pemerintah. Sebagai respon terhadap kritikan tersebut pada akhir 2005 menteri pertanian merencanakan revitalisasi penyuluhan pertanian (RPP). Pencanaan RPP dimaksudkan sebagai upaya mendudukkan, memerankan dan memfungsikan serta menata kembali penyuluhan pertanian agar terwujud kesatuan pengertian, kesatuan korp dan kesatuan arah kebijakan. Sebagai tindak lanjut RPP, pada tahun 2006 pemerintah memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 (UU No.16/2006) tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Pasal 1 ayat (2) UU No.16/2006 yang dimaksud dengan penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya.

Penyuluhan semestinya dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif melalui mekanisme kerja dan metode yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi pelaku utama dan pelaku usaha. Berdasarkan UU No.16/2006 tersebut telah dibentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 (PP No.43/2009) tentang pembiayaan, pembinaan, dan pengawasan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Mengingat berbagai kendala yang dijumpai di lapangan, implementasi dari PP No. 43/2009 ini belum sesuai dengan rencana.

Kelembagaan penyuluhan merupakan faktor determinan yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas sumberdaya manusia pertanian dan tercapainya tujuan dari pembangunan pertanian. Kelembagaan penyuluhan diperlukan untuk mewadai proses penyelenggaraan penyuluhan. Sistem penyuluhan yang dulunya hanya terdiri dari subsistem petani, penyuluh dan kelembagaan struktural menjadi subsistem petani, penyuluh, pelaku agribisnis

lainnya, lembaga penelitian, pendidikan dan lembaga pelatihan. Penyelenggaraan penyuluhan dilakukan dengan pendekatan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi. Salah satu mata rantai lembaga penyuluhan yang terdekat dengan masyarakat dan berada di tingkat kecamatan adalah balai penyuluhan pertanian (Lesmana, 2007).

Peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi nasional sangat penting karena sebagian besar anggota masyarakat di Negara agraris seperti Indonesia menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut. Sebagian negara berkembang saat ini Indonesia juga sedang melaksanakan pembangunan di sektor industri. Proses pembangunan yang dilaksanakan tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada keterkaitan antara sektor perekonomian yang ada, karena masing-masing sektor tidak dapat berdiri sendiri melainkan saling menunjang antara sektor yang satu dengan sektor yang lainnya (Lesmana, 2007).

Sektor pertanian di Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang mempunyai potensi yang cukup besar dalam mengembangkan produksi padi serta peningkatan pendapatan para petani. Adapun jumlah produksi tanaman padi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Produksi, Luas Lahan dan Produktivitas Tanaman Padi di Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan

<b>Tahun</b>	<b>Produksi (Ton)</b>	<b>Luas Lahan (Ha)</b>	<b>Produktivitas (Ton/Ha)</b>
2022	18.336	3.078	5,9
2023	20.000	3.245	6,16
2024	20.013	3.392	5,9
<b>Rata-Rata</b>	<b>19.449</b>	<b>3.238</b>	<b>5,98</b>

Sumber: Data Sekunder Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan Tabel 1 jumlah produksi tanaman padi di Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang, mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu

pada tahun 2022 produksi padi sebesar 18.336 dengan luas lahan 3.078 ha dan produktivitas sebesar 5,9 ton/ha. Tahun 2023 produksi padi sebesar 20.000 ton dengan luas lahan 3.245 ha dan produktivitas sebesar 6,16 ton/ha sedangkan pada tahun 2024 produksi tanaman padi mengalami peningkatan sebesar 20.013 ton dengan luas lahan 3.392 ha dan produktivitas sebesar 5,9 ton/ha.

Padi merupakan komoditas utama dalam menyokong pangan masyarakat Indonesia. Hal tersebut memberikan motivasi tersendiri bagi petani untuk lebih mengembangkan dan meningkatkan produksinya dengan harapan agar memperoleh hasil penjualan tinggi (Hamdana, A. dkk, 2020).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengangkat judul penelitian, dengan judul: “Strategi Peningkatan Kinerja Penyuluh Pertanian di Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja penyuluh pertanian di Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang?
2. Faktor internal apa pada peningkatan kinerja penyuluh pertanian di Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang?
3. Faktor eksternal apa pada peningkatan kinerja penyuluh pertanian di Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang?
4. Bagaimana rumusan strategi peningkatan kinerja penyuluh pertanian di Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis kinerja penyuluh pertanian di Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang.
2. Mengidentifikasi faktor internal yang ada pada peningkatan kinerja penyuluh pertanian di Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang.
3. Mengidentifikasi faktor eksternal yang ada pada peningkatan kinerja penyuluh pertanian di Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang
4. Menganalisis rumusan strategi peningkatan kinerja penyuluh pertanian di Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang.

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini di lakukan sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, sebagai proses pembelajaran kedepan yang berkaitan dengan kinerja penyuluhan pertanian dan bahan informasi bagi peneliti selanjutnya.
2. Bagi petani, sebagai bahan informasi untuk peningkatan produksi tanaman pangan.
3. Bagi pemerintah, sebagai bahan informasi dan masukan kepada pemerintah bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan peningkatan kinerja penyuluh pertanian.
4. Bagi penyuluh, membantu memberikan informasi dan kajian untuk petani tentang program penyuluhan yang ada di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang.